

SINOPSIS

Dengan hadirnya UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang memberikan keleluasaan terhadap Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk dapat menentukan arah kebijakan secara khusus dan pengelolaan rumah tangganya sendiri, tentunya termasuk pula dalam bidang kompetensi aparatur. Namun dalam prakteknya dalam Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo masih ditemukan fenomena seperti: Rendahnya kompetensi sumberdaya aparatur, Banyaknya pekerjaan yang tidak terselesaikan, dan Adanya orang yang menempati jabatan tidak sesuai dengan latar belakang. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini mengambil judul “Upaya Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemda”.

Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara, observasi dan kuesioner, sedangkan teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo ternyata telah melakukan upaya peningkatan kompetensi aparturnya, peningkatan kompetensi tersebut dapat kita lihat dari indikator adanya pendidikan dan pelatihan, hal ini dilakukan agar aparatur makin mendekati kompetensi. Indikator kinerja dan pengukuran kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu mutasi pegawai. Dalam upaya peningkatan kompetensi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kualitas SDM, di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo kualitas SDM secara umum relatif baik. Ini terlihat dari segi pendidikannya dari sejumlah 35 orang karyawan sebagian besar berpendidikan setara sarjana. Faktor Banyaknya pekerjaan yang tidak terselesaikan, dalam mengerjakan tugas pokok pada jabatan/posisi secara umum pekerjaan yang ada pada BKD tidak ada kesulitan dan terlaksana dengan baik, namun ada sebagian program kerja belum terselesaikan, hal ini karena program kerja tersebut tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana kerjanya. Faktor diklat penjenjangan untuk menunjang kemampuan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas, dilakukan melalui diklatpim yaitu diklat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan managerial pejabat struktural (eselon) dari tingkat low manager, midle manager, maupun top manager. Faktor Penempatan aparatur pemerintah, dalam penempatan apratur pemerintah sudah sesuai pada disiplin ilmu/latar belakang pendidikan, hal ini dapat dilihat dari pemberian tugas jabatan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, pengalaman, serta kemampuan potensial yang dimiliki pegawai.

Saran yang diajukan dari penelitian ini adalah dengan adanya upaya peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, sikap dan perilaku aparat harus juga dilakukan secara profesional dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Dan perlu adanya kesadaran terhadap pentingnya